

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

4.1.1 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1. Kegiatan

1. Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Sungai di Provinsi Papua, dengan anggaran sebesar Rp. 643.550.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 596.389.100,- atau 92,67 %. Hasil dari kegiatan ini adalah mendapatkan data base dan tren kualitas air sungai yang telah dilakukan selama 4 tahun dengan memantau 18 titik pantau terdiri dari komponen temp, TDS, TSS, pH, BOD₅, COD, DO, NH₃N, Cl, F, NO₃N, NO₂N, PO₄P, SO₄, SH₂S, As, Fe, Cd, Cr, Mn, Hg, Pb, Cu, Zn, MBAS, M&L, Fenol, Cl₂, Fecal Coliform, Total Coliform sedangkan manfaat dari kegiatan ini adalah dapat diketahui status mutu air.
Permasalahan yang dihadapi adalah sampai saat ini pemantauan kualitas air sungai di Provinsi Papua belum dilaksanakan secara keseluruhan di 28 (dua puluh delapan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota;
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua, dengan anggaran 464.300.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 437.210.192,- atau 94,17%. Hasil dari kegiatan ini adalah
 - Pembekalan Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua oleh Tim Teknis di PSL UGM, Dr. Eko Sugiarto dan Dr. Endang. Pembekalan menitikberatkan pada pendalaman teknik penilaian dokumen Lingkungan (KA-ANDAL, ANDAL, RKL-RPL).
 - Kunjungan Lapangan ke Kelompok Tani Tunas Mekar
Kelompok Tani Tunas Mekar terletak di Kampung Ciletuh Desa Ciderum Kecamatan Caringan Kabupaten Bogor. Kelompok tani ini terdiri dari 200 kelompok. Kelompok tani Tunas Mekar telah menerapkan pengelolaan sawah/padi dan tanaman palawija yang ramah lingkungan. Pemanfaatan limbah padi sebagai pupuk organik telah dilakukan dan diterapkan pada Kelompok Tani Tunas Mekar.
 - Pembekalan Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan sebagai pemateri adalah Erick Teguh, S. Hut/Kasubdit Pengembangan dan Bimtek Direktorat PDLUK.

- Pembekalan Tim Teknis di Jayapura dilakukan dalam bentuk pembinaan, refreshment, dan bedah dokumen yang difasilitasi oleh Dr. Eko Sugiarto (pakar AMDAL UGM).
3. Kegiatan RKL/RPL dan Rencana Pembangunan Venue PON, dengan anggaran sebesar Rp. 236.700.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 216.414.000 atau 91,43%. Hasil dari kegiatan ini adalah dilakukan pemantauan pengelolaan infrastruktur venue PON tersebut di 5 (lima) Kabupaten / Kota yaitu Kabupaten Merauke, Mimika, Jayapura, Biak Numfor dan Kota Jayapura. Manfaatnya agar pembangunan infrastruktur venue PON XX dapat diketahui dokumen lingkungan yang akan diselesaikan sesuai jenis rencana kegiatan.
 4. Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Ambien, dengan anggaran 335.600.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 334.560.000,- atau 99,69%. Hasil dari kegiatan ini adalah dilaksanakan pengukuran pada 12 titik pantau yaitu sample udara,, kelembaban kecepatan angin, arah angin, tekanaa udara, cuaca dan koordinat dengan sasaran road side, pemukiman/perkantoran/pendidikan dan pusat perdagangan/industry dilaksanakan di Kab. Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, Merauke, dan Jayawijaya; dan manfaatnya adalah mengetahui kualitas udara ambien di kabupaten/kota.
 5. Kegiatan Pengawasan Lingkungan Hidup, dengan anggaran Rp. 452.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 389.422.600,- atau 86,16%. Hasil dari kegiatan ini adalah dilaksanakan melalui verifikasi ijin yang dimiliki antara lain; izin lingkungan, izin usaha dan izin terkait lainnya serta kondisi eksisting di lapangan sebagaimana termuat pada dokumen RKL-RPL. Pengawasan dilaksanakan pada 6 perusahaan, yaitu PT. Tandan Sawita di kabupaten Keerom, PT. Internusa Jaya Sejahtera Kabupaten Merauke, PT. Jati Dharma Indah di Kabupaten Nabire, PT. Tunas Timber Lestari di kabupaten Boven Diegol, PT. Eissu dan PT. Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika. Sedangkan manfaatnya adalah agar perusahaan taat dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
 6. Kegiatan Pembinaan Pemantauan dan Penilaian ADIPURA, dengan anggaran 355.500.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 339.723.504,- atau 95,56%. Hasil dari kegiatan ini adalah dilaksanakan pembinaan dan pemantauan ADIPURA di Kota dan 5 kabupaten yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Biak Numfor. Hasil yang diperoleh tahun 2016 adalah Tropi Adipura Kirana untuk Kota Jayapura dan Tropi Adipura Buana untuk kabupaten Biak Numfor. Manfaatnya adalah terbangunnya kerjasama dan komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mewujudkan sukses Adipura di wilayah kerja.

7. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Laboratorium BPLH, dengan anggaran 2.432.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 2.320.390.000,- atau 95,41%. Hasil dari kegiatan ini adalah menyiapkan tenaga analis dan melengkapi sarana dan prasarana laboratorium sedangkan manfaatnya adalah menjaga fungsi dan kualitas lingkungan di Provinsi Papua.

2. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Perusahaan wajib AMDAL yang dipantau sebanyak 60 perusahaan dan pada tahun 2016 hanya mampu 6 perusahaan;
- (b) Pemantauan kualitas air dan udara ambien memerlukan SDM yang berkualitas dan peralatan pengujian yang baik serta laboratorium lingkungan yang terakreditasi dan saat ini BPLH Provinsi Papua baru memiliki 3 orang PPLHD, 5 orang PPNS, dan Laboratorium Lingkungan masih perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana dan tenaga analis yang berkompeten.
- (c) Belum dapat dilakukan pemantauan lingkungan sampai 29 Kabupaten/Kota.

(2) Solusi

- (a) Dipacu akreditasi laboratorium lingkungan Provinsi Papua.

B. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1. Kegiatan

1. Konferensi Internasional Tentang Biodiversitas dan Pariwisata untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif Orang Papua, dengan anggaran sebesar Rp. 8.809.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 7.692.032.310,- atau 87,32%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersosialisasinya potensi keanekaragaman hayati, ekowisata dan ekonomi kreatif Provinsi Papua sebagai modal investasi masyarakat Papua melalui seminar kebijakan, ilmiah, festival budaya dan fieldtrip. terlaksananya Konferensi Internasional Biodiversitas, Ekowisata dan Ekonomi Kreatif, Seminar, Pameran Budaya dan Ekonmi Kreatif, Seminar Ilmiah bagi Peneliti Muda Papua serta Fieldtrip, sedangkan manfaat dari kegiatan ini adalah ajang promosi investasi berbasis potensi keanekaragaman hayati dan ekowisata di Provinsi Papua. Untuk memperoleh dukungan dalam implementasi pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua.

2. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Belum terinventarisir dan terpetakan semua potensi keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem Papua untuk dipromosikan kepada pihak lain dan direncanakan untuk pengembangan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat Papua.

(2) Solusi

- (a) Sebagai solusi atas permasalahan dihadapi maka telah dihasilkan rekomendasi ICBE sebagai upaya tindak lanjut bagi para pihak yang berkepentingan.
- (b) Sosialisasi dan promosi melalui pengembangan ekonomi kreatif dan ekowisata guna mempertahankan identitas budaya dan meningkatkan kualitas hidup orang asli

Papua serta untuk memberantas kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keterisolasian dan kematian.

C. Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan

1. Kegiatan

1. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 115.821.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 72.658.000,- atau 62,73%. Hasil dari kegiatan ini adalah disusunnya buku data dan buku status lingkungan hidup. Manfaat dari kegiatan ini adalah adanya data dan informasi status lingkungan Provinsi Papua.

2. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Belum maksimalnya pengumpulan data di seluruh kabupaten di Provinsi Papua.

(2) Solusi

- (a) Perlu membentuk kelompok-kelompok pengumpul data di Kabupaten/Kota se- Provinsi Papua.

D. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Kegiatan

1. Pembinaan dan Pengawasan Komisi Amdal Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.153.600.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 115.906.300 atau 75,46%. Hasil dari Kegiatan ini adalah melaksanakan pengawasan dan pembinaan melalui evaluasi proses administrasi dan mutu dokumen di Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Merauke. Manfaat dari kegiatan ini adalah agar Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota semakin komprehensif dokumen AMDAL.
2. Forum SKPD Lingkungan Hidup Se-Provinsi Papua dengan anggaran sebesar Rp.454.300.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 425.757.300 atau 93,72%. Hasil dari Kegiatan ini adalah mensinkronkan dan mengevaluasi program pengelolaan lingkungan serta meningkatkan kerjasama dan peran aktif instansi lingkungan hidup dalam pengelolaan lingkungan di Provinsi Papua. Manfaat dari kegiatan ini adalah adanya kesepakatan kerjasama pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan teridentifikasinya permasalahan lingkungan hidup di Provinsi Papua.
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp.329.700.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 185.033.000 atau 56,12%. Hasil dari Kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Pengawas Lingkungan Hidup sebanyak 16 orang dan kursus dasar Amdal sebanyak 4 orang. Manfaat dari kegiatan ini adalah pengetahuan tentang fungsi pengawasan

lingkungan hidup; Meningkatkan pengetahuan tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

4. Penilaian Dokumen LH 10 Kegiatan Wajib AMDAL dengan anggaran sebesar Rp.462.050.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 461.675.200 atau 99,92%. Hasil dari Kegiatan ini adalah melaksanakan penilaian dokumen AMDAL dan administrasi dokumen AMDAL yang akan dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua. Manfaat dari kegiatan ini adalah dokumen lingkungan yang layak lingkungan untuk mendapatkan ijin lingkungan .

2. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Belum terbentuknya komisi Penilai AMDAL Kabupaten yang terakreditasi untuk menilai dokumen AMDAL di Kabupaten.
- (b) Belum semua kabupaten di Provinsi Papua yang memiliki instansi Lingkungan Hidup

(2) Solusi

- (a) Perlu dibentuk klaster Komisi Penilai AMDAL Kabupaten untuk mewakili masing-masing wilayah adat agar lebih efektif dan efisien dalam menilai dokumen AMDAL di wilayah tersebut, sehingga tidak lagi ke Komisi Penilai AMDAL Provinsi.
- (b) Perlu komitmen yang tinggi bagi Pimpinan Daerah untuk menjaga lingkungan salah satunya dengan membentuk instansi lingkungan di wilayahnya.
- (c) Saat ini laboratorium lingkungan Provinsi masih melengkapi sarana dan prasarana laboratorium.

E. Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim

1. Kegiatan

1. Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota (Pilot Project) dengan anggaran sebesar Rp. 450.400.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 433.613.700,- atau 96,27%. Hasil dari kegiatan ini adalah terbentuknya 3 Kelompok pengelola sampah dengan menggunakan metode 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) dan di bagi Komposter, keranjang takakura dan tempat sampah 3R di kabupaten Mimika, Jayapura, Biak Numfor, Jayawijaya, Merauke dan Keerom. Manfaat dari kegiatan ini adalah agar masyarakat dapat mengurangi timbunan sampah (reduce), memanfaatkan sampah (reuse) dan melakukan daur ulang sampah (recycle) secara mandiri.

2. Permasalahan dan Solusi

(1) Permasalahan

- (a) Belum terjangkaunya seluruh kabupaten di Provinsi Papua dalam pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi.

(2) Solusi

- (a) Perlunya kader dan motivator lingkungan bagi masyarakat di seluruh Provinsi Papua untuk menjaga, memelihara, mengelola lingkungan hidup, mengingat terbatasnya dana, sumberdaya manusia, bagi penyelamatan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Papua.

KEPALA BADAN,

Dr. Ir. NOAK KAPISA, M.Sc
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19581122 198703 1 001